

## TEMUAN BPK

## Indonesia Power Dinilai Boros

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan, PT Indonesia Power kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya bahan bakar minyak senilai Rp 27,94 triliun.

Perusahaan ini terus-menerus menggunakan bahan bakar minyak pada enam pembangkit listrik yang dikelolanya. Padahal, pembangkit tersebut bisa dioperasikan dengan bahan bakar ganda, yakni minyak dan gas.

Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Ilya Aviani mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (13/4), dalam konferensi pers yang digelar seusai Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2009 kepada DPR.

Laporan BPK menunjukkan, pengaturan dan penggunaan bahan bakar pada operasi pembangkitan dan kegiatan pemeliharaan di Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Suralaya, UBP Semarang, dan UBP Tanjung Priok belum optimal.

Hal itu terlihat dari tidak tercapainya beberapa indikator kinerja yang berhubungan dengan fungsi pelayanan, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia serta kegiatan pemeliharaan.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas kinerja Indonesia Power menemukan beberapa permasalahan signifikan, antara lain kontrak pembelian batu bara tidak menjamin kelangsungan pasokan batu bara. Hasil tes kinerja belum dapat sepenuhnya dijadikan tolok ukur keberhasilan atas kegiatan pemeliharaan mesin pembangkit PLTU Suralaya.

"Tanpa adanya kontrak pembelian yang jelas, pada saat tertentu, Indonesia Power bisa mengalami kelangkaan energi mendadak," ungkap Ilya.

## Tiga masalah

BPK menemukan tiga masalah yang menjadikan Indonesia Power bermasalah. Pertama, klausul denda atau penalti tidak tercapainya pasokan dalam kontrak pembelian batu bara terlalu lunak. Ini memberikan peluang kepada pemasok untuk mengeksport batu bara ketika harga jual di pasar internasional tinggi.

Hal ini diperparah dengan sistem penyusunan anggaran Indonesia Power yang tidak fleksibel dalam menghadapi fluktuasi harga pasar yang meningkat sangat tinggi.

Penyebab kedua, belum ada kebijakan energi primer pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai regulator yang dapat mendukung tersedianya pasokan gas yang cukup bagi pembangkit PT PLN. Ketiga, manajemen Indonesia Power kurang memprioritaskan usaha untuk menyempurnakan sistem dan sarana bagi kegiatan tes kinerja.

Atas temuan tersebut, kata Ilya, BPK merekomendasikan agar direksi Indonesia Power segera mengupayakan fleksibilitas anggaran. (OIN)

Sumber : Kompas